

REFERENDUM TURKI DI ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFIF FAOZY

NIM : 14370058

PEMBIMBING :

Dr. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

“REFERENDUM TURKI DI ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN”

Dalam negara yang demokratis, memiliki beberapa mekanisme dalam pengambilan sebuah keputusan, di antaranya pemilu, sidang, rapat dan salah satunya referendum. Referendum adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan, terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan, seperti adopsi, amandemen konstitusi, undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara. Turki sebagai negara demokratis yang menjamin adanya referendum dalam konstitusinya. Dibuktikan dengan langkah parlemen Turki yang menyetujui rancangan reformasi konstitusi pada awal bulan Januari 2017 yang kemudian berhasil dilaksanakan pada hari Minggu, 16 April 2017 di Istanbul. Demikian penulis meneliti alasan pokok yang mendasari pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan referendum Turki perspektif Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis mengenai kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam merubah konstitusi Turki dari sistem parlementer menuju ke presidensil, dengan menggunakan sumber buku jurnal, naskah maupun artikel yang terkait.

Berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode dan pendekatan di atas, menjelaskan bahwa hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, dasar pemikiran dari Presiden Recep Tayyip Erdogan adalah semata-mata untuk mencegah aksi kudeta dari militer Turki yang dapat mengancam demokrasi di Turki, *kedua*, tahapan yang ditempuh Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam mereferendum konstitusi Turki merupakan tahapan yang bijak sebagai presiden. Sebab sebagai kepala negara ia tidak sewenang-wenang dalam menentukan keputusan, melainkan dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk dapat diberlakukan.

Kata kunci : Referendum Turki, Siyasah Syar'iyah, Siyasah Dusturiyyah, Presiden Recep Tayyip Erdogan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afif Faozy
NIM : 14370058
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Saya yang menyatakan,


Afif Faozy
NIM. 14370058

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Afif Faozy

NIM : 14370058

Judul Skripsi : Referendum Turki di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan

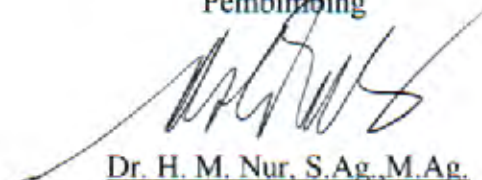
Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Pembimbing



Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP:19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-58/Un.02/DS/PP.00.9/02/2019

Tugas Akhir dengan judul : REFERENDUM TURKI DI ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN SYARIAH DAN HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIF FAOZY
Nomor Induk Mahasiswa : 14370058
Telah diujikan pada : Kamis, 14 Februari 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Penguji II

Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Februari 2019



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Yogyakarta

Dr. Asyraf H. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197710430 199503 1 001

MOTTO

Hiduplah bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu tetapi ia membalasnya dengan buah”

Abu Hamid Al Ghazali

(filsuf muslim asal Persia 1058-1111)

“Orang yang hebat adalah orang yang mampu menjaga dirinya sendiri dan hawa nafsunya”

(Afif Faozy)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh syukur dan rahmat ridho Allah SWT

Untuk yang selalu mendukungku serta yang selalu mendoakanku

Dengan penuh harap, kasih sayang dan penuh cinta

Maka dengan rasa syukur dan penuh terima kasih kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kepada orang tuaku Ayahanda Muchtar Mujdtahid dan Almh. Ibu Sri Siswati yang menjadi sumber semangat dan tiada henti selalu mendidik, memberikan motivasi dan doa tulus yang selalu ia panjatkan

Untuk kakak ku Muhtar Habibi dan kedua adik saya Chyntia Aminova Diana Siskawati, Bachtiar Yusuf dan segenap keluarga besar yang memberikan dukungan, semangat dan menyayangiku

Untuk Desy Pitaloka yang senantiasa menemani saya dari sebelum kuliah sampai selesainya perkuliahan ini.

Untuk Nur Husna Janah seseorang yang datang belum lama di kehidupan saya, yang tak bosan-bosan menyemangati saya dalam menyusun skripsi dan yang selalu membantu memecahkan masalah di dalamnya

Serta teman-teman Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2014 yang selalu menjadi tempat untuk berdiskusi, bermain, bersendaguaru yang takkan pernah aku lupakan

Untuk segenap jajaran dosen Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum

serta

Almamater ku tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Ĵim	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dāmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

<i>fathah</i>	Ditulis	A
<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
---	--------------------	---------	----------

2	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
3	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
4	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوَى الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, Yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"REFERENDUM TURKI DI ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN"** dengan lancar. Penyusun juga tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing, mengarahkan serta memberi nasihat-nasihat kepada

penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan bijaksana.

6. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga khususnya program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan ilmunya selama penyusun mengikuti perkuliahan.
7. Ayahanda Muchtar Mujdtahid dan Almh. Ibu Sri Siswati yang selalu menyayangi serta mendukung langkah penyusun dalam segala hal.
8. Kakak saya Muhtar Habibi dan kedua adik saya Chyntia Aminova Diana Siskawati, Bachtiar Yusuf yang selalu memberi dukungan selama penyusun menempuh studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Desy Pitaloka selaku teman hidup saya yang setia menemani saya dari 0 hingga sekarang ini.
10. Teman karib saya M Ridwan, SH yang rela dan ikhlas meminjamkan laptopnya kepada penyusun untuk dapat mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman dekat saya M Sulton Adibi dan Aby Hudaifah yang senantiasa menemani saya ketika kerepotan dalam menyusun skripsi dan yang selalu menhibur saya dalam keadaan susah.
12. Nur Husna Janah selaku anggota saya ketika di pondok pesantren dulu yang kini telah mendahului saya dalam bidang akademik dan yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, tanpa bantuannya belum tentu skripsi ini akan cepat selesai seperti yang di harapkan.
13. Ibu Inayati Ghufroon selaku tante saya yang telah membimbing dan mensupport saya dalam menyusun skripsi.
14. Keluarga besar Bani Zuhdi, Bani Taufik dan Bani Muhyidin yang selalu membantu saya dalam berlangsungnya proses akademik di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
15. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

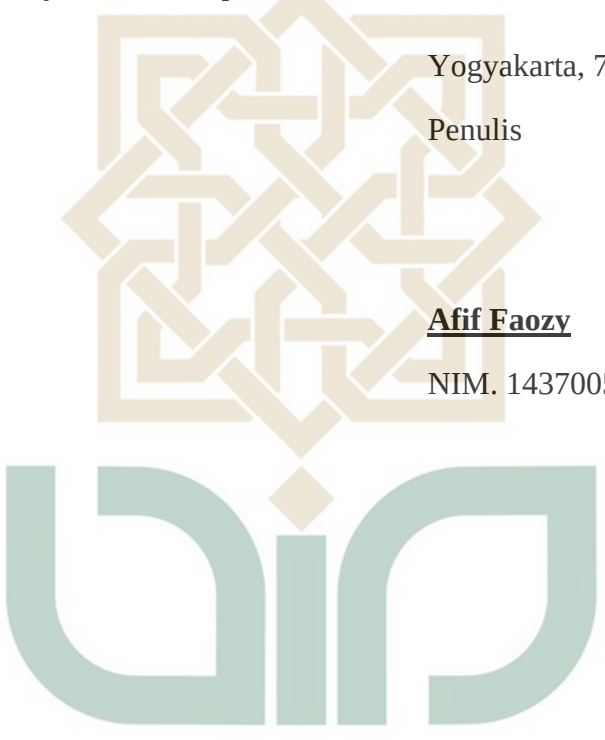
Penulis hanya dapat berdoa semoga mereka mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Penulis menyadari kekeliruan sangat mungkin terjadi dalam penulisan karya ilmiah ini, karenanya kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya dan mendapat ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 7 Februari 2019

Penulis

Afif Faozy

NIM. 14370058



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II REFERENDUM, SIYASAH SYAR'IYYAH DAN SIYASAH DUSTURIYYAH	
A. Referendum	21

B. Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah	23
1. Pengertian Siyasah Syar'iyah.....	23
2. Obyek dan metode Siyasah Syar'iyah.....	26
3. Pengertian Siyasah Dusturiyyah.....	33
4. Hak-hak umat dalam konsep Siyasah Dusturiyyah.....	36
C. Referendum dalam Islam	41
BAB III REFERENDUM TURKI DI ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN	
A. Sistem Pemerintahan di Turki	47
B. Turki pada Masa Presiden Recep Tayyip Erdogan Awal.....	50
1. Biografi dan sepak terjang Presiden Recep Tayyip Erdogan.....	50
2. Masa kecil hingga remaja.....	51
3. Karir politik	52
C. Referendum oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.....	54
1. Latar kebijakan referendum	55
2. Proses referendum.....	61
a. Amandemen konstitusi.....	61
b. Komisi konstitusi parlemen.....	75
c. Voting parlemen.....	76
d. Voting artikel.....	78
e. Tanggapan	80
f. Posisi kampanye.....	84
g. Hasil	84
BAB IV MENAKAR REFERENDUM PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN	
A. Referendum Sebagai Langkah Preventif Dalam Menyelamatkan Turki.....	86
B. Legalitas Referendum Turki oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan	88
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	I
1. DOKUMEN.....	I
2. CURRICULUM VITAE	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Referendum Konstitusional Mesir 2012	43
Tabel 2.2 Hasil Per Gubernurat dengan Prosentase	44
Gambar dan Tabel 3.1 Upaya Kudeta Turki 2016	60
Tabel 3.2 Hasil Proses Pengawasan Komisi Konstitusi Parlemen.....	76
Tabel 3.3 Artikel Terkait.....	78
Tabel 3.4 Hasil Referendum Turki.....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hasil Menurut Governorat.....	43
Gambar 2.2 Hasil Per Governorat	46
Gambar dan Tabel 3.1 Upaya Kudeta Turki 2016	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum, demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang setiap warga negaranya memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang menentukan hidup mereka. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat atau rakyatlah yang mempunyai kedaulatan tertinggi. Demokrasi mengizinkan warga negaranya untuk berpartisipasi baik secara langsung atau dengan perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan juga pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang memungkinkan terjadinya praktik kebebasan politik baik secara bebas dan setara¹. Dalam setiap Negara yang demokratis, tentu memiliki beberapa mekanisme pengambilan sebuah keputusan, diantaranya seperti pemilu, sidang, rapat dan referendum.

Referendum adalah suatu proses pemungutan suara semesta untuk mengambil sebuah keputusan², terutama keputusan politik yang mempengaruhi suatu negara secara keseluruhan, misalnya seperti adopsi atau amandemen konstitusi atau undang-undang baru, atau perubahan wilayah suatu negara.

Pada sebuah referendum, masyarakat yang memiliki hak pilih dimintai pendapatnya. Hasil referendum bisa dianggap mengikat atau tidak mengikat. Sebuah

¹ Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), hlm. 44.

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia "Kamus Besar Bahasa Indonesia"

referendum dianggap mengikat apabila pemerintah harus mengikuti seluruh jawaban rakyat yang ada dalam hasil referendum. Apabila referendum tidak mengikat, berarti referendum itu hanya digunakan sebagai fungsi penasihat saja, di mana hasil yang ada tidak harus diikuti, namun menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya³.

Turki sebagai Negara yang demokratis, menjamin adanya referendum dalam konstitusinya. Dibuktikan dengan langkah parlemen Turki yang menyetujui rancangan reformasi konstitusi pada awal bulan Januari 2017⁴ dan berhasil dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 di Istanbul. Dalam prosesnya, referendum tersebut di menangkan oleh kubu “Ya” atau pro pemerintahan, meski banyak pula masyarakat sipil yang tidak setuju dengan adanya referendum tersebut, terutama partai oposisi. Pasalnya, langkah tersebut hanya akan memperpanjang masa jabatan Presiden Recep Tayyip Erdogan selaku Presiden dan kepala Negara pada masa sekarang ini, yang kemungkinan besar dapat berkuasa hingga tahun 2029 nanti⁵.

Pada tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan resmi menjadi Presiden Turki. Dalam masa kepemimpinannya, Turki mengalami banyak gejolak. Salah satunya ialah aksi

³ Rachmat04, “Pengertian Referendum” <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Referendum> pada tanggal 25 Juli 2018

⁴ Yeyen Rostiyani “Parlemen Sepakat Ubah Konstitusi Turki” diakses dari <https://republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/17/01/17/ojwws617-parlemen-sepakat-ubah-konstitusi-turki> pada tanggal 26 Juli 2018

⁵ Jabbar Ramdhani “Erdogan Menangkan Referendum, Turki Tinggalkan Sistem Parlementer” <https://news.detik.com/internasional/d-3475894/erdogan-menangkan-referendum-turki-tinggalkan-sistem-parlementer> pada tanggal 28 Juli 2018

kudeta pada tanggal 15 Juli 2016 yang di lancarkan oleh tubuh militer Turki⁶. Sejak pembentukan negara Turki modern di tahun 1923, Angkatan Bersenjata Turki (TSK) telah melakukan kudeta tiga kali pada tahun 1960, 1971, dan 1980 dan intervensi melalui memorandum militer pada tahun 1997. Secara historis, militer Turki menganggap organisasinya sebagai penjaga dari Turki yang didirikan di bawah Mustafa Kemal Atatürk⁷, atau yang sering dikenal dengan sebutan kemalis.

Pada masa-masa menjelang upaya kudeta 2016, sidang *ergenekon* berlangsung, yang dipandang sebagai usaha Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk membangun kekuasaan warga sipil atas militer. Dalam sidang itu yang dipandang “sensasional” dan “salah satu sejarah terbesar di Turki” 275 orang, termasuk perwira tinggi militer, polisi, wartawan, pengacara dan akademisi dituduh merencanakan kudeta pada tahun 2003 dan 2004 sebagai bagian dari jaringan rahasia bernama *ergenekon* terhadap Erdogan yang waktu itu adalah Perdana Menteri. Tuduhan *ergenekon* dicabut pada bulan April 2016 oleh Mahkamah Kasasi, yang menyatakan keberadaan jaringan tersebut tidak dapat dibuktikan⁸.

Pada 13 Juli, dua hari sebelum kudeta dilancarkan, Erdoğan menandatangani aturan hukum yang memberikan tentara Turki kekebalan dari peradilan ketika

⁶ Bayu Hermawan “Kelompok Militer Klaim Telah Berhasil Kuasai Turki” diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/oadsf9354-kelompok-militer-klaim-telah-berhasil-kuasai-turki> pada tanggal 28 Juli 2018

⁷ Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, “Upaya kudeta Turki 2016” diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Upaya_kudeta_Turki_2016 pada tanggal 28 Juli 2018

⁸ Bayu Hermawan “Kelompok Militer Klaim Telah Berhasil Kuasai Turki” diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/oadsf9354-kelompok-militer-klaim-telah-berhasil-kuasai-turki> pada tanggal 28 Juli 2018

melakukan operasi keamanan dalam negeri, untuk mengajukan peradilan terhadap komandan harus memerlukan persetujuan dari perdana menteri, sementara tentara pangkat yang rendah cukup dengan persetujuan gubernur. Aturan hukum tersebut dipandang sebagai bagian dari *détente* antara pemerintah dan Angkatan Bersenjata, karena belakangan ini militer telah mengambil alih operasi militer di wilayah yang dihuni warga Kurdi yang sebelumnya dilakukan oleh polisi dan unit paramiliter⁹.

Dari latar belakang tersebut, memicu terjadinya kudeta yang dilancarkan oleh angkatan bersenjata Turki untuk mengambil alih kekuasaan pemerintah yang menurutnya mengancam demokrasi serta sekularisme di Turki. Akan tetapi upaya kudeta tersebut dapat di gagalkan oleh pemerintahan rezim Erdogan dan para warga sipil yang turun kejalan untuk menghentikan aksi tersebut karena tidak ingin kejadian masa lampau terulang kembali. Permasalahan diatas merupakan pokok utama Presiden Recep Tayyip Erdogan untuk melakukan referendum guna mencegah terjadinya konflik internal di Negara Turki.

Dari permasalahan diatas, maka penulis mencoba meneliti alasan pokok yang mendasari pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan referendum Turki yang berlangsung pada 16 April 2017. Selanjutnya penelitian ini akan penulis sajikan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Referendum Turki di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan”**

⁹ Liston P Siregar, “Polarisasi di referendum Turki 'tidak ganggu' kehidupan warga” diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39620824> pada tanggal 28 Juli 2018

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dasar pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan referendum terhadap konstitusi Turki perspektif Siyasah Syar'iyah?
2. Bagaimana tahapan referendum yang dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan perspektif Siyasah Dusturiyyah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menjelaskan dasar pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan referendum terhadap konstitusi Turki.
2. Menjelaskan tahapan referendum yang dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan perspektif Siyasah Dusturiyyah.

Serta penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk memberikan bahan kajian ilmiah dalam memperkaya literatur untuk bahan penelitian selanjutnya.
2. Memberikan kontribusi pemahaman yang lebih jelas mengenai teori-teori Islam dalam mengupas segala permasalahan yang ada, terutama masalah mengenai referendum dari setiap negara.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penulis dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh peneliti lain. Berikut adalah karya ilmiah yang dijadikan telaah pustaka seputar tentang Turki di era pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan :

Pertama, skripsi karya M. Sya'roni Rofii yang berjudul "*Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*". Skripsi ini membahas tentang sepak terjang partai AKP dalam pemilu di Turki yang mampu mengalahkan partai-partai terdahulu yang berasaskan sekularisme mutlak¹⁰. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis oleh penulis terletak pada objek kajian, bahwa penulis lebih menitik beratkan pada referendum yang dilakukan oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pemerintah Turki untuk menentukan system pemerintahan Turki kedepannya.

Kedua, skripsi karya Gunarto yang berjudul "*Pengaruh AKP (Adelet Ve Kalkinma Partisi) Terhadap Lembaga Legislatif Turki (The Grand National Assembly) Tahun 2007-2011*". Skripsi ini membahas tentang keberhasilan partai AKP yang bernuansa Islam di kalangan negara sekuler yang mampu berkuasa di parlemen Turki (TGNA) dan menduduki kursi terbanyak di parlemen¹¹. Perbedaan skripsi ini dengan yang ditulis oleh penulis terletak pada pembahasan pokok masalahnya, bahwasanya pada skripsi tersebut lebih menekankan pada pengaruh serta sepak terjang partai AKP yang mampu merajai dalam tatanan parlemen, sedangkan skripsi ini lebih menekankan pada aspek penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa pasal yang di ubah dalam referendum Turki, sehingga menjadi polemik di tatanan pemerintahan Turki.

¹⁰ M. Sya'roni Rofii, "*Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*," skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008)

¹¹ Gunarto, "*Pengaruh AKP (Adelet Ve Kalkinma Partisi) Terhadap Lembaga Legislatif Turki (The Grand National Assembly) Tahun 2007-2011*", skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014,

Ketiga, skripsi karya A. Miftahul Amin yang berjudul “*Pengaruh Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Dalam Transformasi Turki*”. Skripsi ini membahas tentang pengaruh partai AKP terhadap sistem politik Turki dan dampak yang signifikan dalam konteks perpolitikan di Indonesia¹². Berbeda dengan skripsi ini, bahwasanya partai politik di skripsi penulis ini tidak begitu di singgung secara detail, melainkan bentuk pemerintahan Turki yang dirombak besar-besaran oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam referendum Turki di tahun 2017.

Keempat, skripsi karya Mia Christanti yang berjudul “*Upaya Turki Masuk Kedalam Keanggotaan Uni Eropa*”. Skripsi ini membahas tentang keinginan Turki untuk masuk kedalam Uni Eropa sejak mengajukan permohonan yang diluluskan pada tanggal 12 September 1963, sejak saat itu Turki terus berusaha agar bisa diterima menjadi anggota Uni Eropa¹³. Perbedaan yang terdapat pada skripsi ini terletak pada metodologi penelitiannya. Skripsi diatas menggunakan teori hukum internasional sedangkan penulis menggunakan teori siyasah Syar’iyah dan siyasah Dusturiyyah, dimana sebuah realita dikupas menggunakan hukum islam walaupun tidak menghilangkan muatan umumnya.

Kelima, skripsi karya Ahmad Junaidi yang berjudul “*Kebijakan Politik Recep Toyyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer*”. Skripsi ini membahas tentang alur perubahan suatu bentuk pemerintahan Negara yang semula berbentuk sekularisme

¹² A. Miftahul Amin, “*Pengaruh Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Dalam Transformasi Turki*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹³ Mia Christanti, “*Upaya Turki Masuk Kedalam Keanggotaan Uni Eropa*”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2004.

menjadi islamisme atas keinginan masyarakat islam di Negara Turki¹⁴. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tujuan penulis dalam menulis skripsi ini, yang bermula ingin menegakkan kembali wajah Islam di tubuh Turki walaupun sekarang Turki bukan lagi Negara islam seutuhnya, akan tetapi pergerakan sekularisme masih tetap menyeliputi dalam tubuh militer turkey. Terbukti dalam aksi kudeta yang di luncurkan oleh militer turki kurang lebih selama empat kali, tak lain untuk menegakkan faham sekularisme yang telah didirikan oleh Mustafa Kemal yang di dukung oleh militer turki. Akan tetapi perbedaan yang mencolok dari skripsi ini adalah faham islam yang di bangun oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan semula sudah mengakar pada masyarakat turki dan penulis hanya menelisik lebih dalam pada bentuk pemerintahan Turki yang semula berupa parlementer berubah menjadi presidensil.

Keenam, skripsi karya Afdal Lailatul Qadri yang berjudul “*Kebijakan Pemblokiran Media Massa Oleh Recep Toyyib Erdogan Di Turki*”. Skripsi ini membahas tentang langkah Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam mengendalikan informasi di Turki dengan melalui pemblokiran media massa yang menurutnya banyak membawa pengaruh buruk bagi kehidupan masyarakat Turki serta mengancam berlangsungnya sistem pemerintahan Turki¹⁵. Yang menjadi perbedaan dengan skripsi ini adalah peran media masa pada skripsi ini hanya sebagai data pelengkap, bukan sebagai topik utama yang harus di teliti secara mendalam.

¹⁴ Ahmad Junaidi, “*Kebijakan Politik Recep Toyyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁵ Afdal Lailatul Qadri, “*Kebijakan Pemblokiran Media Massa Oleh Recep Toyyib Erdogan Di Turki*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Ketujuh, jurnal karya Izzatunnisa Galih Widyasari yang berjudul “*Sekularisme dan Kehidupan Politik di Negara Turki Modern*”. Dalam jurnal ini membahas tentang masa Turki dari awal mula pemerintahan Mustafa Kemal, pembentukan partai politik setelah pemerintahan Mustafa Kemal dan dinamika dalam pemerintahan Presiden Recep Tayyip Erdogan saat ini¹⁶. Yang menjadi perbedaannya adalah penerapan referendum Presiden Recep Tayyip Erdogan yang sempat menjadi polemik internal di Negara Turki.

Kedelapan, buku karya Komaruddin Hidayat dalam pengantar buku karangan Binnaz Toprak dengan judul “*Islam dan Perkembangan Politik di Turki*”. Menyebutkan bahwa, islam di Turki menjadi factor utama bagi para pencalon partai politik. Tak heran partai politik di Turki banyak sekali yang menggunakan wajah islam untuk menarik simpatisme masyarakat Turki yang membutuhkan islam dapat tumbuh lagi seperti masa kekhilafahan Ustmani (Ottoman)¹⁷. Perbedaannya terletak pada islam yang menjadi factor utama adanya partai politik maupun asas-asas keislaman atau yang sering disebut dengan islam sebagai partai politik di Negara turki. Sedangkan penulis menempatkan islam sebagai agama yang rohmatal lil ‘alamin yang tidak harus nampak di muka publik tetapi tertanam di hati setiap masyarakat Turki dalam bernegara.

¹⁶ Izzatunnisa Galih Widyasari, “*Sekularisme dan Kehidupan Politik di Negara Turki Modern*”, jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Sastra Indonesia Universitas Indonesia, 2016

¹⁷ Toprak, Binnaz, “*Islam dan Perkembangan Politik di Turki*”, penerjemah Karsidi Diningrat R, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

Kesembilan, buku karya H.A. Mukti Ali yang berjudul “*Islam dan Sekularisme di Turki Modern*”. Menerangkan bahwa problematika di Turki sangat menarik bagi kalangan penulis dari Negara barat, yang banyak menerbitkan buku-buku dengan berbahasa Turki. Dalam karangannya, H.A. Mukti Ali banyak menyinggung mengenai Turki pada masa Mustafa Kemal yang mencetuskan paham sekularisme dengan berkilat ke barat yang kemudian banyak menimbulkan gejolak didalam Negara Turki tersebut. Tak luput pula membahas mengenai perkembangan Turki masa modern yang membuat cengang di antara banyak Negara di dunia¹⁸. Perbedaan dengan skripsi ini yaitu upaya dari Presiden Recep Tayyip Erdogan yang berusaha memotong alur sekularisme yang dipertahankan oleh tubuh militer Turki dengan cara merubah sistem pemerintahan Turki dari parlementer menjadi presidensial.

Kesepuluh, skripsi karya Meilinda Sari Yayusman yang berjudul “*Upaya Turki dalam Memenuhi the Copenhagen Criteria sebagai Syarat Keanggotaan Uni Eropa*”. Skripsi ini membahas tentang upaya Turki untuk masuk kedalam Uni Eropa agar Negara Turki dapat di cantumkan dalam keanggotaan Uni Eropa¹⁹. Dengan alasan sebagian wilayahnya masuk kedalam area Uni Eropa, walaupun hanya sebagian kecil dari luasnya wilayah pemerintahan Negara Turki. Perbedaan dengan skripsi ini, penulis menggaris bawahi pada objek kajiannya.

¹⁸ Ali, A, Mukti, Haji, “*Islam dan Sekularisme di Turki Modern*”, Jakarta: Djambatan, 1994.

¹⁹ Meilinda Sari Yayusman, “*Upaya Turki dalam Memenuhi the Copenhagen Criteria sebagai Syarat Keanggotaan Uni Eropa*”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Siyasah Syar'iiyyah

Secara etimologi siyasah Syar'iiyyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Aqil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan²⁰.

Dari definisi siyasah yang dikemukakan Ibnu 'Aqil di atas mengandung beberapa pengertian. Pertama, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. Kedua, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Ketiga, siyasah itu dalam wilayah ijthadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijthadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iiyyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam

²⁰ Wahbah zuhaily, *"Ushul Fiqh" kuliyyat da'wah al Islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997), hlm. 89.

diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al Qur'an dan Sunnah secara eksplisit²¹

Dengan demikian, penulis akan menggunakan pendekatan Masalah Mursalah dalam mengupas problematika di Turki dalam hal ini mengenai referendum Turki.

Kata Masalah memiliki dua arti, yaitu; pertama: Masalah berarti manfa'ah baik secara timbangan kata yaitu sebagai masdar, maupun secara makna. Kedua : Masalah fi'il (kata kerja) yang mengandung ash-Shalah yang bermakna an-naf'u. Adapun teori masalah ditinjau dari segi etimologis, berasal dari kata bahasa arab "مصلحة" merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata "صلح" yang berarti sesuatu yang baik dan yang mengandung manfaat. Masalah merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa arab masalah sering pula disebut dengan "الصواب" yaitu yang baik dan benar.

Secara terminologis, terdapat beberapa definisi masalah yang dikemukakan ulama usul fiqh, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al-Ghazali, mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara', sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara'. Jamaluddin

²¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah, edisi revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), hlm. 29.

Abdurrahman menyebutkan masalah dengan pengertian yang lebih umum yang dibutuhkan itu ialah semua yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian, kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Selain itu, Imam al-Gazali mendefinisikan masalah ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan”.

Dari beberapa definisi di atas, esensi dari masalah yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara’ bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada ’ilat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan masalah. Tujuan utama masalah ialah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.

2. Teori Siyasah Dusturiyah

Kata siyasah berasal dari kata sasa berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu²².

Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan²³.

Sedang kata “dusturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata dustur berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, dustur berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi)²⁴.

Maka penulis akan mengupasnya dengan alat Musyawarah yang ada pada teori Siyasah Dusturiyyah dalam mengetahui alur pembahasan perundang-undangan di Turki.

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 3.

²³ Ibid, hlm. 4

²⁴ Ibid, hlm. 154

Istilah musyawarah berasal dari kata مشاورة . Ia adalah masdar dari kata kerja syawara-yusyawiru, yang berakar kata syin, waw, dan ra, dengan pola fa'ala. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu” Dari makna terakhir ini muncul ungkapan syawartu fulanan fi amri (aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku).

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.

Dalam susunan kemasyarakatan, prinsip musyawarah ditegakkan sesuai dengan azas hukum yang mendasari sistem demokrasi. Tetapi musyawarah itu sendiri tidak terikat oleh komunitas yang sifatnya pasif (pemerintahan atau kenegaraan) saja, ia menyentuh segala aspek yang menyangkut kepentingan bersama, bukan masalah yang telah menjadi ketetapan Tuhan.

Karena persoalan-persoalan yang telah ada petunjukannya dari Tuhan secara tegas dan jelas, baik langsung maupun melalui nabi Nya, tidak dapat dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukan pada hal-hal yang belum ditentukan

petunjuknya, serta persoalan–persoalan kehidupan duniawi baik yang bersifat global maupun tanpa petunjuk yang mengalami perkembangan dan perubahan.

Musyawarah merupakan esensi ajaran Islam yang wajib ditetapkan dalam kehidupan sosial umat Islam. Syura memang merupakan tradisi Arab pra Islam yang sudah turun-temurun. Oleh Islam tradisi ini dipertahankan karena syura merupakan tuntutan abadi dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial.

Kata “syura” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “Musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia. Dengan demikian, keputusan yang diambil berdasarkan Syura merupakan sesuatu yang baik dan berguna bagi kepentingan kehidupan manusia.

Musyawarah merupakan kata kunci yang semua orang Indonesia tidak hendak menolak. Bagi orang Islam, menerima azas musyawarah untuk membangun mufakat adalah perkara aqidah. Karena ungkapan itu adalah petunjuk suci yang termaktub dalam kitabullah. Bagi semua orang Indonesia, musyawarah adalah wahana konstitusional untuk mewujudkan azas kerakyatan atau demokrasi. Musyawarah untuk mufakat adalah bentuk kongkrit dari forum perumusan konsensus yang berhikmat kebijaksanaan bukan sembarang konsensus yang bisa melenceng menjadi kesepakatan itu “deal” yang mengacu pada Self Interest atau transaksi kepentingan semata–mata.

Melalui musyawarah setiap masalah yang menyangkut kepentingan umum dan kepentingan suatu rakyat dapat ditemukan dalam satu jalan keluar yang sebaik baiknya setelah semua pihak mengemukakan pandangan dan pikiran, mereka wajib patuh oleh pemegang negara supaya ia dalam membuat suatu keputusan dapat mencerminkan pertimbangan-pertimbangan dan bijaksana untuk kepentingan umum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan melihat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam merubah konstitusi Turki dari system parlemen menuju ke presidensil. Dengan menggunakan sumber buku, jurnal, naskah, maupun artikel yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif-analisis adalah mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikannya, mengklasifikasikannya dan menggambarkan, menguraikan data yang tampak berkaitan dengan tema yang diteliti, kemudian menganalisisnya secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh makna dibalik fakta tersebut.²⁵

Dengan demikian, penulis akan mengumpulkan data terkait dasar pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan konstitusi referendum Turki serta

²⁵ Nyoman Kutha Ratna, *"Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)"*, cet. Ke- 1, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm 338.

tahapan referendurnya, kemudian data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan teori Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan normative-filosofis, yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni kebijakan referendum Turki oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum, norma, kemudian mengkaji buku-buku, jurnal dan ketentuan perundang-undangan yang telah ada dalam relevansinya dengan masalah yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu secara literatur dengan menelaah skripsi, jurnal, buku, artikel ilmiah, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan kebijakan Presiden Recep Tayyip Erdogan mengenai referendum konstitusi Turki. Serta buku-buku yang berkaitan dengan teori Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Data yang telah diperoleh disusun dan dideskripsikan dengan menganalisis Referendum Turki Oleh Presiden Recep Tayyip

Erdogan. Dengan demikian penulis dapat memudahkan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka peneliti membagi skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan. Sistematika pembahasan tersebut diantaranya sebagai berikut :

Bab satu, adalah pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas dan menjelaskan mengenai arti dan makna referendum secara umum, teori Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah kemudian referendum dalam Islam yang pernah terjadi, maupun hal-hal yang mirip dengan referendum dalam dunia Islam.

Bab ketiga, membahas tentang referendum Turki di era Presiden Recep Tayyip Erdogan yang di dalamnya terdapat beberapa aspek yang membahas mengenai Demokrasi Turki, Turki pada masa Presiden Recep Tayyip Erdogan awal, referendum oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Bab empat, membahas tentang referendum Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam kaca mata Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah, yang di dalamnya akan menjelaskan referendum sebagai langkah preventif menyelamatkan Turki dan legalitas referendum Turki oleh Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Bab lima, merupakan bab akhir dan penutup dari skripsi ini, yang terdiri dari kesimpulan penelitian serta saran-saran dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi dasar pemikiran Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam melakukan referendum konstitusi Turki adalah merupakan salah satu langkah preventif yang ia lakukan dalam keadaan darurat guna menyelamatkan Turki dari aksi arogansi militer pada saat itu, yang dapat mengancam kemaslahatan serta keamanan warga Turki. Langkah tersebut sejalan dengan konsepsi Siyasah Syar'iyah yang pada hakikatnya kemaslahatan umat adalah faktor utama yang harus di wujudkan oleh seorang pemimpin.

Pandangan Siyasah Dusturiyyah dalam mengupas tahapan yang di tempuh Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam merealisasikan rancangan referendumnya yaitu dimulai dengan masuknya proposal pada tanggal 10 Desember 2016 ke parlemen, dengan jumlah awal sebanyak 20 proposal rancangan amandemen yang kemudian pada tanggal 30 Desember 2016 parlemen memangkasnya menjadi 18 proposal sekaligus mengesahkan rancangan tersebut sebagai referendum sah di Turki. Pemungutan suara parlemen dimulai pada 9 Januari 2017, dengan putaran pertama pemungutan suara selesai pada 15 Januari 2017. Putaran kedua pemungutan suara selesai pada 20 Januari 2017, dengan semua amandemen yang diusulkan disetujui. Sedang pemungutan suara di masyarakat dilaksanakan pada tanggal 16 April 2017 dan dinyatakan berhasil. Pasalnya masyarakat Turki berpendapat bahwa perubahan itu diperlukan untuk Turki yang kuat dan stabil, dengan alasan bahwa presiden eksekutif

akan mengakhiri pemerintahan koalisi yang tidak stabil yang telah mendominasi politik Turki sejak 1960-an hingga 2002.

B. Saran

Setelah selesai melakukan penelitian dan kesimpulan dengan menggunakan teori Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah terhadap Referendum Turki di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan, penulis setuju bahwa suatu kebebasan berpendapat dan beraksi dalam suatu Negara yang demokrasi itu sah-sah saja, karena pemerintah menjamin akan hal itu dalam undang-undang nya. Tetapi penulis juga akan memberikan saran akan lebih baik lagi apabila kebebasan tersebut dapat digunakan dengan bijak dan sejalan dengan tujuan bernegara. Dimana sebagai warga Negara baik itu sipil, aparat Negara maupun warga biasa bisa mengemukakan pendapatnya guna mendukung dalam bentuk bela Negara agar lebih maju dan mampu bersaing di ranah internasional, bukan malah mengerogoti pilar-pilar keamanan serta kemaslahatan dalam suatu Negara.

Demikian skripsi yang berjudul Referendum Turki di Era Presiden Recep Tayyip Erdogan menurut kaca mata Siyasah Syar'iyah dan Siyasah Dusturiyyah yang dapat penulis kemukakan. Pembahasannya tentu saja masih jauh dari kata sempurna, karena setiap manusia pasti mempunyai kekurangan masing-masing.

Penulis sangat berharap kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak agar dapat dilakukan perbaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca.



DAFTAR PUSTAKA

FIQIH SIYASAH

A.Djazuli, *Fiqh Siyâsah*, edisi revisi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media Grup (Kencana), 2016

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2013

LAIN-LAIN

Soetjipto Wirosardjo, *Dialok dengan Kekuasan*, Bandung: Mizan, 1995

Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: Mizan, 1995

M. Quraishi Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III, Mesir: Mustafa AlBab al-Halabi, 1972

Abu al-a'la al-Maududi, *Hukum Dan Konstitusi Dalam Sistem Politik Islam*. Jakarta: Mizan, 1975

Eggi Sudjana, *HAM Demokrasi dan Lingkungan Hidup*, Bogor: Yayasan As-Syahidah, 1998

Ahmad Sukardja, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

A. Hasimy, *Dimana Letaknya Negara Islam*, Yogyakarta: Bina Ilmu, 1984

Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997

Wahbah az-Zuhailly, *Ushul al-Fiqh al-Islamiy Juz 2*, Dimasyq: Dar al-Fikr, 2005

Rahmad Syafi'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

- Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustafa min 'ilm al-usul*, Kairo: al-Matba'ah al-Amiriyyah. Jilid I
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999
- Abu Nash Al Faraby, *As Siyâsah Al Madaniyah*, tahqiq dan syarah 'Ali Bu Milham, Beirut: Dar Maktabah Al Hilal, 1994
- Ibnul Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyâsat al syar'iyah*, tahqiq Basyir Muhammad Uyun, Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan, 2005
- Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, *As Siyâsah as Syar'iyah fi islâhir râ'i war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun, Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993
- Syekh Abdul, Wahab Khallaf, 1993, *Ilmu Usul Fiqih*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Wahbah Zuhaily, “*Ushul Fiqh*”, *kuliyat da'wah al Islami*, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997.
- Toprak, Binnaz, *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, penerjemah Karsidi Diningrat R, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Ali, A, Mukti, Haji, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, Jakarta: Djambatan, 1994.
- Yavuz, Hakan, M, dan Esposito, John, L, *Turkish Islam and The Secular State : The Gulen Movement*, New York: Syracuse University Press, 2003.
- Nur, Muhammad, *NII (Negara Islam Indonesia) No NII (Negara Islam indonesia) Yes Pergulatan Konsep Negara Dalam Peradaban Islam Modern*, cet 1, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2011.
- Ker, H, Malcolm, *Islamic Reform The Political and Legal Theories o Muhammad Abduh and Rashid Ridha*, (Barkeley and Los Angeles: University of California Press, 1966.
- Husaini, S, Waqar Ahmad, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam alih Bahasa dari Islamic Environmental System Engineering oleh Anas Mahyudi*, Bandung: Pustaka Salman ITB, 1983
- Firdaus, Nur, Muhammad, “*Perpu Perspektif Nomokrasi Islam*” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- Ratna, Kutha, Nyoman, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, cet. Ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Gunawan Sumodiningrat & Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa dan Negara Pegangan dalam Hidup Berbangsa dan Bernegara di Indonesia*, (Bogor: PT. Sarana Komunikasi Utama, 2008), hlm. 44.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Republik Indonesia “Kamus Besar Bahasa Indonesia”

Gunarto, “*Pengaruh AKP (Adelet Ve Kalkinma Partisi) Terhadap Lembaga Legislatif Turki (The Grand National Assembly) Tahun 2007-2011*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

A. Miftahul Amin, “*Pengaruh Adelet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Dalam Transformasi Turki*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

M. Sya’roni Rofii, “*Partai AKP dan Ideologi Islam di Turki Modern (2001-2007)*,” skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Mia Christanti, “*Upaya Turki Masuk Kedalam Keanggotaan Uni Eropa*”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya, 2004.

Ahmad Junaidi, “*Kebijakan Politik Recep Toyyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Afdal Lailatul Qadri, “*Kebijakan Pemblokiran Media Massa Oleh Recep Toyyib Erdogan Di Turki*”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Meilinda Sari Yayusman, “*Upaya Turki dalam Memenuhi the Copenhagen Criteria sebagai Syarat Keanggotaan Uni Eropa*”, skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2015.

Izzatunnisa Galih Widyasari, “*Sekularisme dan Kehidupan Politik di Negara Turki Modern*”, jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Sastra Indonesia Universitas Indonesia, Tahun 2016.

- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Referendum> diakses pada tanggal 25 Juli 2018
- <https://republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/17/01/17/ojwws617-parlemen-sepakat-ubah-konstitusi-turki> diakses pada tanggal 26 Juli 2018
- <https://news.detik.com/internasional/d-3475894/erdogan-menangkan-referendum-turki-tinggalkan-sistem-parlementer> diakses pada tanggal 28 Juli 2018
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/oadsf9354-kelompok-militer-klaim-telah-berhasil-kuasai-turki> diakses pada tanggal 28 Juli 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Upaya_kudeta_Turki_2016 diakses pada tanggal 28 Juli 2018
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/oadsf9354-kelompok-militer-klaim-telah-berhasil-kuasai-turki> diakses pada tanggal 28 Juli 2018
- <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39620824> diakses pada tanggal 28 Juli 2018
- <https://en.wikipedia.org/wiki/Referendum> diakses pada tanggal 15 Desember 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum_konstitusional_Mesir_2012 diakses pada tanggal 28 September 2018
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Turki> Diakses tanggal 30 September 2018
- www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa dan dalam bahasa Turki <http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-anayasasi.tr.mfa> diakses pada tanggal 30 September 2018
- <https://dunia.tempo.co/read/1103628/usai-pelantikan-erdogan-turki-terapkan-sistem-pemerintahan-baru> diakses pada tanggal 30 September 2018
- <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170313160702-134-199759/menelisik-rancangan-reformasi-konstitusi-kontroversial-turki> diakses pada tanggal 30 September 2018
- <https://republika.co.id/berita/koran/internasional-koran/17/01/17/ojwws617-parlemen-sepakat-ubah-konstitusi-turki> diakses pada tanggal 30 September 2018

- <https://news.detik.com/internasional/4080016/pencapaian-erdogan-selama-15-tahun-terakhir-berkuasa-di-turki> diakses pada tanggal 5 Oktober 2018
- <https://www.thejakartapost.com/academia/2018/06/26/erdogan-a-strong-leader-in-need.html> diakses pada tanggal 6 Oktober 2018
- https://id.wikipedia.org/wiki/Referendum_konstitusi_Turki_2017 diakses pada tanggal 5 Oktober 2018
- <http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/16/07/16/oadsf9354-kelompok-militer-klaim-telah-berhasil-kuasai-turki> diakses pada tanggal 28 Juli 2018
- <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170211-1.htm> Diakses pada tanggal 10 November 2018
- https://en.wikipedia.org/wiki/2010_Turkish_constitutional_referendum Diakses pada tanggal 10 November 2018
- <https://dunia.tempo.co/read/866306/eksklusif-catatan-jurnalis-turki-soal-referendum-konstitusi> diakses pada tanggal 15 November 2018
- <https://geotimes.co.id/kolom/internasional/menakar-arah-referendum-turki/> diakses pada tanggal 15 November 2018
- <http://www.mfa.gov.tr/turkiye-cumhuriyeti-anayasasi.tr.mfa> yang kemudian di terjemahkan ke dalam bahasa Inggris www.mfa.gov.tr/constitution-of-the-republic-of-turkey.en.mfa diakses pada tanggal 17 November 2018
- <https://www.voaindonesia.com/a/dekrit-darurat-baru-turki-bisa-picu-kemunculan-vigilante/4179232.html> diakses pada tanggal 20 November 2018
- <http://observare.ual.pt/janus.net/en/131-english-en/vol-9,-n-1-may-october-2018/421-en-vol9-n1-art6> diakses pada tanggal 20 November 2018
- https://www.researchgate.net/publication/233342507_The_Personality_and_Leadership_Style_of_Recep_Tayyip_Erdogan_Implications_for_Turkish_Foreign_Policy diakses pada tanggal 22 November 2018
- <https://www.voaindonesia.com/amp/kelompok-ham-tuduh-turki-upayakan-impunitas-/3389639.html> diakses pada tanggal 22 November 2018

LAMPIRAN

Dokumen asli Referendum Turki yang telah disahkan

11 Şubat 2017 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29976

KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6771

Kabul Tarihi: 21/01/2017

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “ beşyüzelli ” ibaresi “ altıyüz ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ Yirmibeş ” ibaresi “ Onsekiz ” şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan “yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,” ibaresi “askerlikle ilişkisi olanlar,” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – 2709 sayılı Kanunun 77 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“C. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanının seçim dönemi

MADDE 77 – Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde 101 inci maddedeki usule göre ikinci oylama yapılır.”

MADDE 5 – 2709 sayılı Kanunun 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 87 – Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.”

MADDE 6 – 2709 sayılı Kanunun 98 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır.

“MADDE 98 – Türkiye Büyük Millet Meclisi; Meclis araştırması, genel görüşme, Meclis soruşturması ve yazılı soru yollarıyla bilgi edinme ve denetleme yetkisini kullanır.

Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinmek için yapılan incelemeden ibarettir.

Genel görüşme, toplumu ve Devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir.

Meclis soruşturması, Cumhurbaşkanını yardımcılarını ve bakanlar hakkında 106 ncı maddenin beşinci, altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca yapılan soruşturmadan ibarettir.

Yazılı soru, yazılı olarak en geç onbeş gün içinde cevaplanmak üzere milletvekillerinin, Cumhurbaşkanını yardımcılarını ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri Meclis İçtüzüğü ile düzenlenir.”

MADDE 7 – 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Adaylık ve seçimi

MADDE 101 – Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüzbin seçmen aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada, adayın geçerli oyların çoğunluğunu alamaması halinde, sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.

Seçimlerin tamamlanamaması halinde, yenisi göreve başlayıncaya kadar mevcut Cumhurbaşkanının görevi devam eder.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 8 – 2709 sayılı Kanunun 104 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 104 – Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.

Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisinde açılış konuşmasını yapar.

Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.

Kanunları yayımlar.

Kanunları tekrar görüşülmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisine geri gönderir.

Kanunların, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün tümünün veya belirli hükümlerinin Anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açar.

Cumhurbaşkanı yardımcılarını atar ve görevlerine son verir.

Üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir ve bunların atanmalarına ilişkin usul ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenler.

Yabancı devletlere Türkiye Cumhuriyetinin temsilcilerini gönderir, Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul eder.

Milletlerarası andlaşmaları onaylar ve yayımlar.

Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunar.

Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir.

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır.

Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygulanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz hale gelir.

Cumhurbaşkanı, kanunların uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilir.

Kararnameler ve yönetmelikler, yayımdan sonraki bir tarih belirlenmemişse, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe girer.

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”

MADDE 9 – 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu

MADDE 105 – Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının görevi sona erer.

Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde hükmü uygulanır.”

MADDE 10 – 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve bakanlar

MADDE 106 – Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir.

Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet eder ve Cumhurbaşkanı'nın yetkileri kullanır.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde andiçerler . Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır.

Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi

sona erer.

Cumhurbaşkanı yardımcılarını ve bakanlar, görevleriyle ilgili olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden yararlanır.

Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”

MADDE 11 – 2709 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yenilenmesi

MADDE 116 – Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.

Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.

Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de beş yıldır.”

MADDE 12 – 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden çıkarılmıştır.

“III. Olağanüstü hal yönetimi

MADDE 119 – Cumhurbaşkanı; savaş, savaşı gerektirecek bir durumun başgöstermesi , seferberlik, ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir.

Olağanüstü hal ilanı kararı, verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya olağanüstü hali kaldırabilir.

Cumhurbaşkanının talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz.

Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlandırılacağı veya geçici olarak durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir.

Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.

Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

MADDE 13 – 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Disiplin mahkemeleri dışında askerî mahkemeler kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askerî mahkemeler kurulabilir.”

MADDE 14 – 2709 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinin başlığı ile birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” şeklinde değiştirilmiştir.

“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde çalışır.

Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabîi üyesidir. Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelere, en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için üç aday, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılmaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılmaması halinde, ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.

Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir.

Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”

MADDE 15 – 2709 sayılı Kanunun 161 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“A. Bütçe ve kesinhesap

MADDE 161 – Kamu idarelerinin ve kamu iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları yıllık bütçelerle yapılır.

Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konulamaz.

Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır.

Bütçe kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılmaması durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki yılın bütçesi yeniden değerlendirme oranına göre artırılarak uygulanır.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde bulunamazlar.

Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik önerileri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve oylanır.

Merkezi yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı karanamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm konulamaz.

Carî yıl bütçesindeki ödenek artışı öngören değişiklik teklifleri ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak gösterilmesi zorunludur.

Merkezi yönetim kesinhesap kanunu teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç altı ay sonra Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç yetmişbeş gün içinde Meclise sunar.

Kesinhesap kanunu teklifi ve genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılmamış denetim ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı anlamına gelmez.

Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”

MADDE 16 – 2709 sayılı Kanunun;

A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin dördüncü fıkrasında ve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”; 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu ve”, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, doğrudan doğruya veya Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,”; 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak, ” ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”, altıncı fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ve “Yüksek”, yedinci fıkrasında yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı”; 153 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”; 154 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları,” ve “tüzük tasarılarını incelemek,” üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden çıkarılmıştır.

B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 78 inci maddesinin başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler”; 117 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı”; 118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları,” “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanlarından”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi “Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında yer alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 124 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi “Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” ibaresi “tarafından”; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği bakana”; 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 148 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları”; 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “on”; 150 nci maddesinde yer alan “kanun hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 151 inci maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve askeri” ibaresi “adli ve idari”; 166 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 167 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.

C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt çoğunluğuyla” ve 117 nci maddesinin üçüncü fıkrasının başına “Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri eklenmiştir.

Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,” ibaresinden önce gelmek üzere “idari soruşturma,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında yer alan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış; üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından,” ibaresi “Başkan ve üyeleri,” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir.

D) 146 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi “onbeş” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile dördüncü fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.

E) 82 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96 ncı maddesinin ikinci fıkrası, 117 nci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları, 127 nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 150 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 102, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 21 – A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27'nci Yasama Dönemi milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.

B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkinci günü takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte iki çoğunlukla seçimin sonuçlandırılmaması halinde, ikinci ve üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır. Yeni üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapıncaya kadar mevcut Kanunun Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcılar arasından seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcılar arasından seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave edilir.

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.

E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepeleri dikkate alınarak;

a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya savcı olarak atanabilirler.

b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, malî, sosyal hak ve yardımlar ile diğer hakları yönünden emsali adli veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların dışındaki hak ve yükümlülükler yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık veya Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bunlardan, emeklilik hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara ödenecek tazminata ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Kaldırılan askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir.

F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler yürürlükten

kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152 nci ve 153 üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur.

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılncaya kadar Cumhurbaşkanlığı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67 nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.”

MADDE 18 – Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının ilğaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ve 125 inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127 nci maddenin son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 148 inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası, 161, 162, 163, 164, 166 ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler ile geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,

c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişkisi kesilir” ibaresinin ilğası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.

10/02/2017

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

CURRICULUM VITAE



Nama : Afif Faozy

Tempat/Tanggal lahir : Pemalang, 8 Mei 1994

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Gelar Akademik : Sarjana Hukum (S.H)

Alamat : Jalan Melon Sewaka RT: 002, RW: 003 Kranggan, Sewaka, Pemalang, Jawa Tengah

No Telepon : 085868744498

Email : afief19fatah@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. 1999 sampai 2001 TK Tunas Harapan Sewaka Pemalang
2. 2001 sampai 2006 SD N 01 Sewaka Pemalang
3. 2006 sampai 2009 SMP Al Manshuriyah Mengori Pemalang
4. 2009 sampai 2012 MAN Pemalang
5. 2014 sampai 2019 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta